



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

# RENCANA STRATEGIS 2020

DEPUTI BIDANG  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

# 2024



DIREKTORAT PENGENDALIAN

DIREKTORAT EVALUASI

ISU STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI PENCAPAIAN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah subhana wataala, atas segala rahmat dan karuniannya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi ini merupakan turunan dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024. Namun pada Rencana Strategis ini hanya memuat kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024, untuk menyesuaikan dengan periode RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana strategis ini terdiri dari 5 (lima) BAB, dimana pada BAB I Pendahuluan menyajikan Kondisi Umum, urgensi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan potensi dan permasalahan. Pada BAB II menyajikan nilai, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Pada BAB III menyajikan isu strategis, arah kebijakan dan strategi pencapaian. Pada BAB IV menyajikan kegiatan, sasaran kegiatan, indikator dan indikasi pendanaan. Serta BAB V sebagai penutup.

Dengan segala kerendahan hati, kami sepenuhnya menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan dan kritikan untuk perbaikan dan kesempurnaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dikemudian hari.

Demikian Rencana Strategis Kedeputian bidang Pengendalian dan Evaluasi ini kami susun, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan bagi bangsa dan Negara.

Jakarta, November 2020

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Rima Agristina

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM .....	1
B.    URGENSI DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI .....	2
C.    KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	3
D.    STRUKTUR ORGANISASI.....	4
E.    SUMBER DAYA MANUSIA .....	4
F.    POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	4
BAB II.....	7
NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	7
A.    NILAI.....	7
B.    VISI.....	7
C.    MISI.....	8
D.    TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	9
BAB III .....	11
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN .....	11
A.    ISU STRATEGIS .....	11
B.    ARAH KEBIJAKAN .....	13
C.    STRATEGI PENCAPAIAN .....	13
BAB IV.....	16
KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN INDIKASI PENDANAAN .....	16
BAB V .....	20
PENUTUP .....	20

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi ..... 4

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program, IKU, dan Target .....	10
Tabel 2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK, Target dan Alokasi Anggaran.....	17

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. KONDISI UMUM

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari abang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar, falsafah, atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan kepada kita untuk menjadi penunjuk sekaligus pengarah. Namun sayangnya, kondisi kita sekarang ini cita ideal tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial.

Hadirnya Badan Ideologi Pancasila diharapkan dapat menjadi leading sector pembinaan ideologi Pancasila yang sesuai dengan konsep dasar para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Pembinaan Ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sector kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Agar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan Pengendalian dalam penyusunan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, aktualisasi nilai-nilai Pancasila

dimasyarkat dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila. Salah satu perangkat organisasi BPIP yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila adalah Deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Direktorat, yaitu Direktorat Pengendalian dan Direktorat Evaluasi.

## B. URGENSI DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, deputi bidang pengendalian dan evaluasi memiliki tugas pokok Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- d. Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengendalikan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila agar sesuai dengan standar nilai Pancasila sebagaimana yang menjadi konsep dasar dan hasil konsesus para pendiri bangsa, serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BPIP maupun Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah tidak keluar dari koridor atau jalan menuju tujuan berbangsa dan bernegara.

Selain itu dampak dari globalisasi yang telah menyentuh sendi- sendi kehidupan masyarakat akan berdampak pada masuknya ideologi- ideologi luar yang dapat mengancam eksistensi Pancasila. Oleh karena untuk mencegah hal tersebut maka dibutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila tersebut. Agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat terus menjadi paham yang digunakan oleh bangsa Indonesia.

### C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi berkedudukan sebagai lini Kedeputian dibawah Kepala Badan, dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun tugas pokok Deputi bidang pengendalian dan evaluasi memiliki tugas pokok Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
3. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
4. Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi bidang Pengendalian dan evaluasi dibantu oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pengendalian dan Direktorat Evaluasi, serta 3 (tiga) Kepala Sub Direktorat dimasing-masing Direktorat.

Adapun tugas pokok dari Direktorat Pengendalian adalah Melaksanakan urusan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila;
3. Penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi

Sedangkan tugas pokok dari direktorat evaluasi adalah Melaksanakan urusan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila, dengan fungsi sebagai berikut:

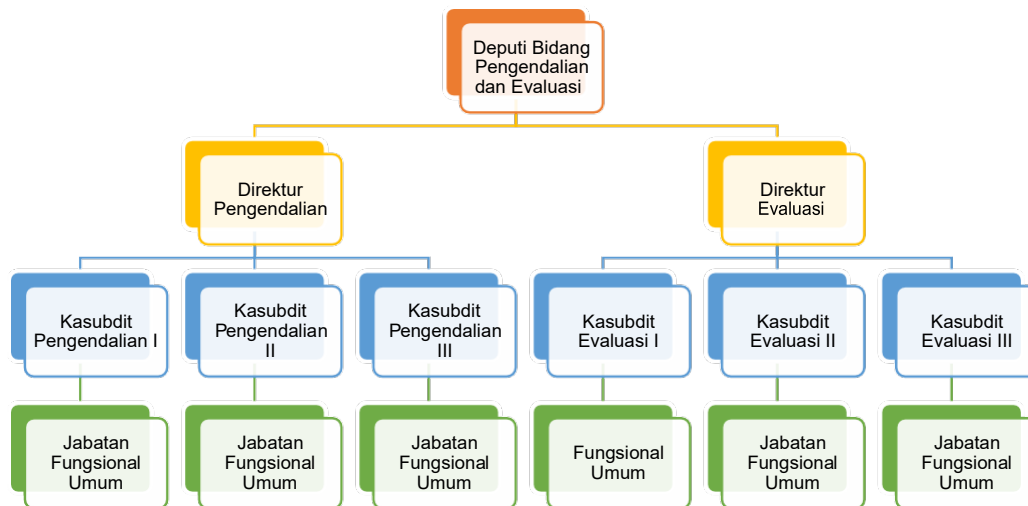
1. Koordinasi evaluasi pembinaan ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila;
3. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi



#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan kepala Badan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, struktur organisasi dari Deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG PENGEDALIAN DAN EVALUASI



#### E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, saat ini jumlah aparat pegawai yang ada di Kedeputusan bidang pengendalian dan Evaluasi adalah sebanyak 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. 1 orang Deputi;
2. 2 orang Direktur
3. 6 orang Kasubdit
4. 6 orang JFU
5. 3 orang pegawai tidak tetap; dan
6. 2 orang sopir.

Dengan kondisi tersebut, sumber daya manusia yang ada pada Deputi Pengendalian dan Evaluasi masih belum ideal, namun untuk menjalankan tugas dan fungsi jumlah tersebut dirasa cukup.

#### F. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun rencana strategis, Kedeputusan bidang pengendalian dan evaluasi menggunakan teknis analisis SWOT untuk menganalisis lingkungan internal

dan eksternal berupa peluang potensi dan tantangan. Adapun kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang telah diidentifikasi dan digali dari dalam organisasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

## 1. Analisis lingkungan internal

### a. Kekuatan

- 1) Kedudukan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang merupakan organisasi lini setingkat eselon I, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- 2) Dukungan dan komitmen pimpinan;
- 3) Urgensi kebutuhan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- 4) Ditunjang dengan anggaran yang cukup; dan
- 5) Tugas dan fungsi yang cukup luas meliputi pengendalian kebijakan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Implementasi kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

### b. Kelemahan

- 1) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang belum ideal;
- 2) Organisasi yang baru sehingga pola kerja belum terbentuk;
- 3) Pengetahuan akan administrasi pemerintahan yang kurang;
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar unit ke deputian di BPIP; dan
- 5) Pemahaman dan interpretasi tugas pokok dan fungsi yang belum jelas.

## 2. Analisis lingkungan Eksternal

### a. Peluang

- 1) Dukungan politis dari stakeholder terhadap keberadaan badan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Kedudukan Badan ideologi Pancasila yang berada langsung dibawah Presiden;
- 3) Ketokohan Dewan Pengarah;
- 4) Tuntutan dari masyarakat luas agar Pancasila kembali diajarkan di lini kehidupan masyarakat;
- 5) Dukungan presiden terhadap eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 6) Lokasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berada di lingkungan Sekretariat Negara.

b. Ancaman

- 1) Adanya keengganan dari Kedeputian lainnya untuk di kendalikan dan di evaluasi;
- 2) Kesulitan dalam memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- 3) Kesulitan dan mengikutiperkembangan Teknologi dan informasi yang menuju era 4.0;
- 4) Dinamika organisasi dan lingkungan yang sangat dinamis dan berubah-ubah; dan
- 5) Situasi politik dalam negeri.

## BAB II

### NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. NILAI

Dalam upaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BPIP maka dibutuhkan pedoman perilaku dalam bentuk nilai sebagai buclaya organisasi BPIP, bahwa setiap insan BPIP meyakini dan menjalankan nilai BPIP sebagai berikut:

##### 1. Ketuhanan (yang welas asih)

Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengembangkan sikap saling memahami dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan demi terbinanya kerukunan hidup.

##### 2. Kemanusiaan (yang adil dan beradab)

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki sikap tenggang rasa, dan berkomitmen membela kebenaran dan keadilan.

##### 3. Persatuan (dalam kebhinnekaan)

Mencintai tanah air, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperkuat persatuan dalam kebhinnekaan, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

##### 4. Permusyawaratan (dengan hikmat kebijaksanaan)

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan dibimbing oleh akal sehat dan kebijaksanaan serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah publik.

##### 5. Keadilan Sosial

Mengembangkan perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan melalui usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, bekerja keras, dan menghargai karya sesama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

#### B. VISI

Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang

masa depan yang ingin dicapai.

Selain itu, visi juga adalah pandangan mengenai arah sebuah manajemen. Mau dibawa ke arah mana manajemen tersebut? Agar bisa membangun kesuksesan, maka perlu ada arah jelas mengenai laju perusahaan atau instansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi kedeputian bidang pengendalian dan evaluasi memiliki visi yang bertujuan agar organisasi deputi pengendalian dan evaluasi dapat menjalankan peran yang besar bagi pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan kelangsungan dari badan pembinaan Ideologi Pancasila itu sendiri.

Visi Deputi Pengendalian dan evaluasi tidak dapat terlepas dari visi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan. Adapun visi dari Deputi bidang Pengendalian dan evaluasi adalah “mewujudkan terlaksananya kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang berkepribadian dalam berkebudayaan”.

### C. MISI

Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.

Misi juga bisa dikatakan sebagai Penjabaran sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau siapa saja yang melihatnya.

Adapun misi dari Deputi Pengendalian dan evaluasi yang merupakan penjabaran dari visi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengendalian yang mengutamakan perbaikan bagi organisasi BPIP dalam Menyusun kebijakan dan melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Melaksanakan pendampingan bagi setiap kedeputian dalam menyusun kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
3. Melakukan pemantauan periodik yang berkesinambungan pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila oleh kedeputian lainnya;
4. Membangun jaringan agen pengendali pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan

5. Membangun sinergitas dan kolaborasi dengan kementerian dan Lembaga serta Pemerintah daerah dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

#### D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan arah perwujudan dari visi dan misi suatu Lembaga atau organisasi. Adapun tujuan dari deputi pengendalian dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila;
2. Mewujudkan pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang sesuai dengan standar kriteria kebijakan pembinaan yang disusun;
3. Mewujudkan aktualisasi Pancasila di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila; dan
4. Mencegah masuknya paham-paham dan ideologi luar yang mengancam eksistensi Pancasila.

Sedangkan sasaran strategis dari Deputi Pengendalian dan evaluasi adalah:

1. terselenggaranya pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas;
2. terselenggaranya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat;
3. Terbangunnya system pengendalian dan evaluasi terpadu berbasis IT;
4. Terselenggaranya evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
5. Terselenggaranya evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, ditetapkan juga indikator utama dari sasaran strategis, serta target volume satuan yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, adapun indikator kinerja utama dari sasaran strategis kedeputian bidang Pengendalian dan Evaluasi adalah :

1. Persentase dokumen pengendalian kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
2. Persentase dokumen hasil evaluasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
3. Persentase Sistem Pengendalian dan Evaluasi terpusat berbasis elektronik yang termanfaatkan.

Target dari sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama tersebut dalam 5 (lima) tahun dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1: sasaran program, IKU dan target

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi pancasila	Persentase dokumen pengendalian kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	40%	60%	80%	80%	100%
	Persentase dokumen hasil evaluasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	40%	60%	80%	80%	100%
	Persentase Sistem Pengendalian dan Evaluasi terpusat berbasis elektronik yang termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

### BAB III

#### ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

##### A. ISU STRATEGIS

Isu strategis pada Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi tidak terlepas dari isu strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terdapat 5 (lima) pokok soal yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis BPIP, yaitu:

1. kurangnya pemahaman Pancasila:
  - a. intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
  - b. kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
  - c. masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
  - d. sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, kurang terstruktur, dan kurang terkoordinasi;
  - e. rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
  - f. pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin; dan
  - g. kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila.
2. terjadinya eksklusivisme sosial:
  - a. arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas;
  - b. menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
  - c. lemahnya budaya kewargaan;
  - d. Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme; dan
  - e. lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial.



3. masih tingginya kesenjangan sosial:
  - a. kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
  - b. masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
  - c. meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antar wilayah;
  - d. kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
  - e. tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
  - f. lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; dan
  - g. masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.
4. belum terlembaganya Pancasila:
  - a. lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
  - b. kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - c. masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila; dan
  - d. masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
5. belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila:
  - a. semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik;
  - b. kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;
  - c. kurang pengarusutamaan keteladanan pancasila di ruang publik;
  - d. masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; dan
  - e. tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik.

Isu strategis di kedeputan bidang Pengendalian dan evaluasi sendiri ada 4 (empat), yaitu:

1. belum terselenggaranya pengendalian pembinaan ideologi Pancasila;
2. belum terselenggaranya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat;
3. belum terselenggaranya evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
4. belum terselenggaranya evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

## B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 2 (dua) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil yang lebih optimal. Berdasarkan isu strategis di kedeputan bidang Pengendalian dan evaluasi arah kebijakan deputi Pengendalian dan Evaluasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila;
2. Meningkatkan kolaborasi *pentahelic* Bersama komunitas, swasta, akademisi dan media dalam pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat;
3. Melibatkan peran akademisi dalam evaluasi atau pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila berbasis segmentasi;
4. Meningkatkan mutu pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila;
5. Meningkatkan peran serta deputi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur lingkup kedeputan pengendalian dan evaluasi;
7. Meningkatkan pengetahuan dan penggunaan teknologi dalam mendukung pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan,

perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi deputi pengendalian dan evaluasi dalam pencapaian target sasaran adalah sebagai berikut:

1. Membagi sasaran kegiatan pada Deputi Pengendalian dan Evaluasi menjadi 4 (empat) sasaran kegiatan dengan masing-masing indicator kinerja kegiatannya, yaitu :
  - a. SK 1 yaitu terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, dengan indicator kinerja kegiatannya adalah jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan jumlah pembangunan dan pengembangan system pengendalian terpadu berbasis elektronik;
  - b. SK 2 yaitu terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan indicator kinerja kegiatannya yaitu jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
  - c. SK 3 yaitu terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, dengan indicator kinerja kegiatannya adalah jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan jumlah pembangunan dan pengembangan system evaluasi terpadu berbasis elektronik;
  - d. SK 4 yaitu terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan indicator kinerja kegiatannya yaitu jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara; jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara; jumlah dokumen evaluasi dan penanganan organisasi masyarakat, organisasi dan perusahaan asing serta media yang bertentangan dengan ideologi negara/Panacasila.
2. Menyusun target capaian kinerja kegiatan dan indikasi pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Membangun kolaborasi *manajemen pentahelic* dengan komunitas, swasta, akademisi dan media, dengan pendekatan sebagai berikut:
  - a. Membentuk pasukan pengendalian bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat, dan komunitas;

- b. Membuat alat pengendalian:
  - c. Membangun sistem pengendalian dan evaluasi berbasis IT;
  - d. Menyusun metode pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
  - e. Membangun alat ukur evaluasi dengan melibatkan para ahli di Bidanganya;dan
  - f. Menyusun metode evaluasi yang lebih efektif dan komprehensif.
4. Menyusun rencana kerja tahunan dan petunjuk operasional kerja.

## BAB IV KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN INDIKASI PENDANAAN

Untuk Memudahkan Deputi Pengendalian Dan Evaluasi Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Progress Capaian Sasaran Program Yaitu Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Maka Dilakukan Penyusunan Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Dan Indikasi Pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Adapun uraian Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Dan Indikasi Pendanaan selama 5 (lima) tahun, dapat dilihat pada table matrik sebagai berikut:

Tabel 2: Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK, Target dan Alokasi Anggaran

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi Anggaran (dalam juta)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila	jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok		4.463,7	4.965,1	5.365,1	5.865,1
		jumlah pembangunan dan pengembangan system pengendalian terpadu berbasis elektronik	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 paket		350	350	450	450
	terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis aktualisasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		2.200	2.400	2.671,5	3.020,2

	nilai Pancasila terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai- nilai Pancasila terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai- nilai Pancasila terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai- nilai Pancasila	nilai-nilai Pancasila										
Pelaksanaan evaluasi hasil pembinaan ideologi pancasila	terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok		7.240,6	8.279,7	8.646,6	9.536,3
		jumlah pembangunan dan pengembangan system evaluasi terpadu berbasis elektronik	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 paket		750	850	900	1.000
	terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-	jumlah dokumen evaluasi dan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1.400	1.500	1.750	2.000

nilai Pancasila	penanganan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara											
	jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1.400	1.500	1.750	2.000	
	jumlah dokumen evaluasi dan penanganan organisasi masyarakat, organisasi dan perusahaan asing serta media yang bertentangan dengan ideologi negara/Panacasila	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		4.000	4.500	4.850	5.150	



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Kedeputan bidang Pengendalian dan Evaluasi tahun 2020-2024, merupakan turunan dari Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024, dimana dalam Rencana Strategis ini digambarkan rencana program dan kegiatan kedeputan bidang pengendalian dan evaluasi yang bersifat strategis, berkesinambungan dan berjangka 5 tahun, sesuai dengaperiode dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana strategis ini berisi komitmen dari Deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi beserta seluruh perangkat yang ada untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang pada akhirnya akan berdampak pada tujuan organisasi yang lebih besar yaitu tujuan dari Badan pembinaan ideologi Pancasila.

Rencana strategis ini juga disusun dengan maksud sebagai upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, baik yang dilaksanakan oleh BPIP maupun kolaboratif dengan Kementerian Lembaga, serta Pemerintah Daerah.

Rencana strategis ini juga merupakan acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh deputi bidang pengendalian dan evaluasi.

Rencana strategis ini setiap tahun akan direviu untuk melihat perkembangan pencapaian serta dinamika organisasi sehingga apabila diperlukan maka rencana strategis dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi organisasi BPIP maupun Pemerintahan yang lebih tinggi.